

RESPONS ASEAN TERHADAP PENINGKATAN RIVALITAS AS-CHINA

Rizki Roza

Abstrak

Para menlu ASEAN dan negara mitra wicara ASEAN baru saja melakukan pertemuan membahas berbagai persoalan di kawasan. Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai peningkatan rivalitas AS dan China yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan kawasan. Bagaimana ASEAN dan negara mitranya merespons isu tersebut dapat mempengaruhi ketegangan yang saat ini sedang dihadapi. Tulisan singkat ini berusaha menggambarkan ancaman yang dihadapi ASEAN akibat meningkatnya rivalitas AS-China dan respons ASEAN serta negara mitranya terhadap kondisi tersebut. Berdasarkan penelusuran terhadap sikap ASEAN dalam rangkaian pertemuan tingkat Menlu, dapat dikatakan ASEAN hanya mampu menyampaikan sikap yang sangat normatif dan berhati-hati. Respons ini dapat dipahami mengingat keterbatasan dan ketergantungan ASEAN terhadap kedua negara yang berselisih. Opsi untuk mengedepankan kerja sama Indo-Pasifik bisa dilihat sebagai pilihan paling rasional saat ini. Oleh karena itu, Indonesia, baik pemerintah maupun DPR, bersama negara anggota ASEAN lainnya, harus menangkap setiap peluang yang dapat meningkatkan kerja sama dalam kerangka Indo-Pasifik.

Pendahuluan

Para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN baru saja melaksanakan serangkaian pertemuan yang dilaksanakan secara daring, yaitu pertemuan *the 53rd ASEAN Foreign Ministers (AMM)*. Dipimpin oleh Menlu Vietnam sebagai tuan rumah, rangkaian pertemuan yang dimulai pada 9 September itu juga diikuti dengan pertemuan antara ASEAN dengan negara-negara mitra wicara, antara lain *ASEAN Regional*

Forum, East Asia Summit, ASEAN-China, ASEAN-AS, dan sebagainya. Berbagai isu penting kawasan dibahas bersama dalam forum-forum tersebut.

Salah satu isu penting bidang keamanan yang dibahas adalah terkait peningkatan rivalitas antara antara Amerika Serikat (AS) dan China. Isu ini penting untuk menjadi perhatian karena perkembangan terkini menunjukkan kondisi yang semakin membahayakan



perdamaian dan keamanan kawasan. Masyarakat internasional akan mencermati respons ASEAN terhadap perkembangan rivalitas tersebut. Tulisan singkat ini akan menelusuri respons ASEAN terhadap rivalitas AS-China yang tercermin dalam rangkaian pertemuan para Menlu ASEAN dan Menlu negara-negara mitra. Akan digambarkan terlebih dahulu peningkatan rivalitas AS-China agar dapat dipahami ancaman perdamaian dan keamanan apa yang sedang dihadapi kawasan saat ini. Dengan pemahaman atas kedua hal itu, diharapkan dapat diketahui pula upaya apa yang selanjutnya perlu dijalankan Indonesia, termasuk dukungan yang dapat diberikan DPR.

Peningkatan Rivalitas AS-China

Kebijakan *Pivot to Asia* yang diadopsi AS pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dapat dilihat sebagai awal meningkatnya kehadiran AS di kawasan. Dengan argumen untuk menciptakan suatu kawasan Asia yang damai, stabil dan sejahtera, pemerintahan Obama mengalihkan fokus kebijakan luar negeri AS yang sebelumnya di Timur Tengah. Sejak saat itu banyak pihak, terutama China, melihat perubahan kebijakan AS ini sebagai bentuk upaya AS untuk membendung pertumbuhan pesat China di bidang ekonomi dan militer.

Persaingan dua kekuatan utama dunia itu meningkat signifikan ketika Donald Trump memasuki masa jabatannya sebagai Presiden AS. Berlandaskan pada pandangannya bahwa hubungan dagang antara AS dan China telah berlangsung tidak adil, sejak awal tahun 2018 Pemerintahan Trump mulai mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menaikkan bea masuk

terhadap produk-produk China. Selanjutnya kedua negara saling berbalas kebijakan perdagangan yang saling menyulitkan kegiatan dagang satu sama lain, menandai terjadinya perang dagang diantara mereka. Perang dagang menyebabkan pelemahan ekonomi kedua negara, dan juga memberi efek domino pada banyak negara lainnya di dunia. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva pada Oktober 2019 lalu bahkan menyebut bahwa dampak dari perang dagang AS-China bisa mengurangi porsi perekonomian global setara dengan perekonomian Swiss.

Persaingan kedua negara juga terjadi di bidang militer. Berdasarkan laporan *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) tahun 2019, pengeluaran dunia untuk kebutuhan militer mencapai tingkat tertinggi sejak berakhirnya Perang Dingin dimana AS dan China tercatat sebagai penyumbang pengeluaran militer terbesar. AS mulai menaikkan anggaran pertahanannya sejak 2018, dan secara jelas menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat kekuatan China merupakan faktor pendorong kenaikan tersebut, dan direspons dengan langkah serupa oleh China.

Perang dagang dan peningkatan pengeluaran militer kedua negara kemudian diikuti dengan isu persaingan pengembangan teknologi digital, isu Hong Kong, isu pelanggaran HAM, dan pertentangan dalam merespons isu COVID-19. Persaingan teknologi informasi misalnya dapat dilihat dari rangkaian kebijakan yang diambil Pemerintahan Trump yang mempersulit bisnis Huawei sejak tahun lalu hingga saat ini. Tidak hanya berupaya melemahkan Huawei, Pemerintahan Trump juga menggunakan tekanan dan ancaman pelarangan operasi di

AS untuk menguasai saham *TikTok*, aplikasi video singkat asal China.

Keretakan hubungan kedua negara terus melebar. Ketegangan diplomatik berulang kali terjadi antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan diplomatik yang terkini dipicu oleh pembatasan pergerakan diplomat oleh kedua negara. Kementerian Luar Negeri China, pada September menerapkan pembatasan pergerakan terhadap semua diplomat AS di China sebagai balasan terhadap tindakan serupa yang telah dilakukan Washington terhadap para diplomat dan staf kedutaan besar China di AS.

Isu Taiwan dan Laut China Selatan (LCS) tentu juga tidak dapat dipisahkan dari hubungan kedua negara, dimana isu ini paling sering memicu insiden antar-kekuatan maritim. Sebagai bentuk penentangan AS terhadap klaim teritorial China di LCS, AS secara teratur mengirimkan patroli kapal perangnya di kawasan sengketa. Akibatnya, armada Angkatan Laut (AL) kedua negara berulang kali terlibat insiden di kawasan tersebut. Perkembangan terakhir, setidaknya sepanjang bulan Juli dan Agustus, menunjukkan kondisi yang makin mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan militer AS yang selama ini hanya untuk unjuk kekuatan dan menyatakan kehadirannya, saat ini telah meningkat dan dapat dilihat sebagai sebuah persiapan perang. Latihan yang melibatkan kapal induk, kegiatan pengintaian udara, kehadiran kapal selam, dan pesawat pem-bom B-52 merupakan kehadiran kekuatan militer yang jauh berbeda dan mengkhawatirkan dibanding dengan aksi-aksi militer AS di LCS sebelumnya. Di lain pihak, pada awal Juli, China mengadakan latihan militer di laut yang memicu kecaman keras dari

Vietnam dan Filipina. Kedua pihak tetap saling menuduh telah memicu ketegangan.

Tindakan militer AS tersebut diikuti dengan pernyataan pemerintahnya bahwa AS telah mengubah kebijakannya di LCS. Perubahan kebijakan ini dapat memberi dampak serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Perubahan kebijakan AS dalam mengelola persoalan LCS, pernyataan-pernyataan keras dari pejabat AS dan tindakan militer yang dijalankannya dalam beberapa waktu terakhir, menyiratkan bahwa Pemerintahan Trump telah meninggalkan opsi dialog dan kerja sama untuk menyelesaikan persoalannya dengan China. Sangat beralasan jika negara-negara anggota ASEAN, dan negara lainnya yang berkepenting terhadap kawasan mengkhawatirkan perkembangan ini. ASEAN harus dapat memberikan respons yang memadai agar dapat meredakan ketegangan antara kedua negara.

Respons ASEAN dan Kekuatan lainnya

Sebelum pertemuan tingkat Menlu ASEAN dan negara-negara mitra, pada Agustus lalu ASEAN telah menyikapi kondisi geopolitik kawasan dan global yang dapat berdampak pada perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, dan secara lebih luas Indo-Pasifik. Komunikasi intensif dengan seluruh Menlu ASEAN yang dimulai Menlu RI Retno Marsudi sejak akhir Juli menghasilkan pernyataan bersama yang diadopsi pada 8 Agustus. Pernyataan bersama tersebut menegaskan komitmen ASEAN untuk terus menjadi lokomotif bagi perdamaian, keamanan dan

kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara serta kawasan yang lebih luas di Indo-Pasifik. Melalui pernyataan bersama yang terdiri dari 8 poin itu, ASEAN menegaskan kembali sejumlah nilai dasar ASEAN. Ditegaskan juga agar semua pihak menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memicu eskalasi di kawasan. Bagi ASEAN, penting untuk mengedepankan dialog dan cara damai untuk mengembangkan kepercayaan strategis, menegaskan sentralitas ASEAN dan prinsip-prinsip dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, serta multilateralisme.

Peningkatan rivalitas AS-China kemudian juga dibahas dengan hati-hati oleh ASEAN bersama negara-negara mitra wicaranya dalam rangkaian pertemuan tingkat Menlu, termasuk dengan Menlu AS dan China. Secara umum, ASEAN hanya berusaha konsisten dengan sikap yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam rangkaian pertemuan tingkat Menlu ASEAN dengan Menlu negara mitra wicara, baik di dalam forum *East Asia Summit*, *ASEAN Regional Forum*, dan juga dalam pertemuan dengan Menlu India, Jepang, Australia, atau pun Selandia Baru, ASEAN hanya kembali menegaskan pernyataan yang telah diadopsi sebelumnya. Beberapa negara mitra menyatakan dukungannya terhadap sikap ASEAN, misalnya India yang menyatakan pentingnya ASEAN di kawasan, termasuk dalam memajukan kerja sama dalam konteks Indo-Pasifik. Australia juga menyampaikan apresiasinya atas pernyataan yang dikeluarkan para Menlu ASEAN pada 8 Agustus 2020. Namun tidak demikian dengan China dan AS.

Pertemuan ASEAN dengan AS diwarnai dengan desakan

Menlu AS Pompeo terhadap negara-negara ASEAN untuk menghadapi perundungan maritim oleh China di kawasan Asia Tenggara. Pompeo juga mengajak ASEAN untuk tidak bekerja sama dengan sejumlah perusahaan China yang dijatuhi sanksi oleh AS karena dianggap terlibat dalam militerisasi kawasan LCS. Di lain pihak, dalam pertemuan dengan China, Menlu China Wang Yi menyebut bahwa AS telah ikut campur di LCS dan mendorong militerisasi di kawasan itu. Rangkaian pertemuan ASEAN dengan AS dan China dapat dilihat sebagai upaya kedua negara untuk menarik keberpihakan ASEAN.

Merespons desakan keberpihakan, ASEAN menggunakan rangkaian pertemuan tingkat Menlu itu untuk menegaskan netralitas ASEAN. ASEAN mengedepankan komitmen bersama dan tanggungjawab kolektif dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran kawasan. ASEAN tampaknya juga mengandalkan konsep Indo-Pasifik yang diusung ASEAN untuk meningkatkan kerja sama seluruh pihak di kawasan dan diharapkan dapat meredakan ketegangan.

Respons yang ditunjukkan ASEAN sangat normatif dan mencerminkan kehati-hatian, namun dapat dipahami. Hubungan yang tengah berkembang antara sebagian negara ASEAN dengan China, dan juga hubungan yang sudah terjalin lama dengan AS, tampaknya mendorong ASEAN untuk lebih berhati-hati dalam merespons rivalitas AS dan China. Ketimpangan kekuatan militer antara negara-negara ASEAN dengan AS dan China juga sangat membatasi pilihan sikap yang dapat diambil ASEAN. Dengan segala keterbatasan itu, mengedepankan kerja sama Indo-Pasifik yang mengajak lebih banyak pihak untuk turut menjaga stabilitas

kawasan, tampaknya menjadi pilihan yang rasional bagi ASEAN dan juga bagi Indonesia sebagai salah satu inisiator konsep Indo-Pasifik.

Di tengah kondisi yang diuraikan di atas dan pilihan respons ASEAN, setidaknya ada dua perkembangan di kawasan yang perlu ditindaklanjuti oleh ASEAN untuk memacu kerja sama Indo-Pasifik, yaitu pergantian kepemimpinan pemerintahan Jepang, dan perubahan kebijakan keamanan Australia. Terpilihnya Yoshihide Suga sebagai Perdana Menteri Jepang menggantikan Shinzo Abe dapat membawa perubahan pada arah kebijakan pertahanan Jepang. Suga dilihat tidak memiliki komitmen sebesar Abe untuk melakukan normalisasi kekuatan militer Jepang, yang artinya akan mempengaruhi dukungan militer Jepang terhadap AS di kawasan.

Dokumen *2020 Defense Strategic Update and Force Structure Plan*, yang belum lama ini dirilis oleh Australia, menunjukkan bahwa Australia sedang mengubah arah kebijakan strateginya. Dokumen tersebut menginginkan peran Australia yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Perubahan Australia ini perlu dicermati dan dirangkul untuk bersama-sama ASEAN mengupayakan perdamaian dan keamanan kawasan Indo-Pasifik dengan mengedepankan sentralitas ASEAN.

Selain Australia dan Jepang, kebijakan negara kecil seperti Republik Palau juga dapat menimbulkan dampak strategis yang besar. Akses yang diberikan oleh Presiden Palau Tommy Remengesau terhadap AS untuk membangun pangkalan militer di negaranya sangat memungkinkan memperburuk keadaan. Ini menegaskan besarnya tantangan yang harus dihadapi ASEAN dalam

mengedepankan konsep kerja sama Indo-Pasifik untuk meredakan rivalitas di kawasan. Kerja sama Indo-Pasifik tidak hanya membutuhkan dukungan negara-negara besar, melainkan juga kesamaan pandangan dan komitmen dari seluruh negara di kawasan tersebut.

Penutup

Rivalitas antara AS dan China dalam beberapa tahun terakhir terus meluas dan memburuk. Perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, telah membawa rivalitas kedua raksasa ini pada kondisi yang mengkhawatirkan. Lonjakan kehadiran militer AS di kawasan sengketa bahkan dapat dilihat sebagai sebuah persiapan perang, atau setidaknya sebagian pengamat melihatnya sebagai upaya untuk memprovokasi perang.

Merujuk pada pernyataan sikap yang pernah disampaikan oleh Menlu ASEAN pada 8 Agustus, dan pada sikap yang ditunjukkan ASEAN dalam rangkaian pertemuan tingkat Menlu AS dan Menlu negara-negara mitra wicara, respons yang diberikan ASEAN sangat normatif. ASEAN hanya menegaskan kembali prinsip-prinsip umum yang diusung organisasi, dan berusaha mendorong konsep Indo-Pasifik sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kerja sama di kawasan yang akan meredakan ketegangan. Melihat segala keterbatasan ASEAN, respons ini dapat saja dianggap sebagai pilihan rasional yang dapat dilakukan saat ini. Namun, ASEAN harus mampu menangkap perubahan-perubahan di kawasan agar dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya jalan keluar yang diinginkan ASEAN.

DPR, melalui berbagai forum kerja sama antarparlemen, dapat memberi dukungan untuk mewujudkan langkah-langkah yang dijalankan pemerintah Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya.

Referensi

Ashley Townshed and Brendan Thomas-Noone, *Australia Steps Up in Defense of the Indo-Pacific Order*, <https://thediplomat.com/2020/08/australia-steps-up-in-defense-of-the-indo-pacific-order/>, diakses 14 September 2020.

Chen Xiangmiao, "The US 'New Cold War' Battle Cry in the South China Sea," <https://thediplomat.com/2020/08/the-us-new-cold-war-battle-cry-in-the-south-china-sea/>, diakses 14 September 2020.

Hu Bo, *China-US Military Confrontation in the South China Sea: Fact and Fiction*, <https://thediplomat.com/2020/06/china-us-military-confrontation-in-the-south-china-sea-fact-and-fiction/>, diakses 14 September 2020.

Press Briefing Menlu Sabtu, 12 September 2020 Jakarta, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1682/berita/press-briefing-menlu-sabtu-12-september-2020>, diakses 14 September 2020.

US Navy Carrier Conducts Exercises in South China Sea, <https://www.aljazeera.com/news/2020/08/navy-carrier-conducts-exercises-south-china-sea-html-diakses> 14 September 2020.



Rizki Roza
rizki.roza@dpr.go.id

Rizki Roza, S.Ip., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Confidence Building Measures dan Program nuklir Iran" (2010); "Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap modernisasi militer" (2013); dan "Kerjasama internasional dan Peran industri sipil dalam industri pertahanan" (2013).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.